



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JL. BALONGSARI TAMA TANDES TELP. 7412278 FAX .7412279

Website : www.bpsdm.jatimprov.go.id

SURABAYA

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 188.4/1/205.1/2023

TENTANG

**PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi, perlu menetapkan Program Pengembangan Kompetensi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);

7.Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
14. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS;
15. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 tahun 2022 tentang Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
16. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia PBJ;
17. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 257/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi;
18. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 258/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Struktural dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Terakreditasi;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur

22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tanggal 7 Nopember 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Tanggal 1 Januari 2023 Nomor DPA/A.1/5.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan, :

- KESATU : Program dan Kegiatan Pengembangan Kompetensi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kompetensi dimaksud, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut
1. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kompetensi;
 2. menyiapkan bahan, materi pengembangan kompetensi, tenaga pengajar dan kelengkapan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan kompetensi;
 3. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kompetensi.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Instansi Pengirim.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR



Lampiran : Keputusan Kepala BPSDM Provinsi
 Jawa Timur
 Tanggal : 2 Januari 2023
 Nomor : 188.4/1/205.1/2023

**PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH	
		PST	HARI
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	KEGIATAN		
	1. Pengembangan Kompetensi Teknis		
	2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
I.	<u>BIDANG PENGEMBANGAN PENGAJARAN DAN KOMPETENSI</u>		
1.	Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	-	-
2.	Evaluasi Hasil Belajar	-	-
3.	Evaluasi Dampak Diklat	-	-
4.	Penjaminan Mutu	-	-
5.	Kerjasama Kediklatan	-	-
6.	ASN Achievement Award	-	-
7.	Inovasi Kediklatan	-	-
8.	Bulletin Swara Diklat	-	-
9.	Penerbitan Jurnal Kompetensi Aparatur	-	-
10.	Pengembangan SDM Widyaiswara	-	-
11.	Bimbingan Teknis Perhitungan Angka Kredit JF Analis Bangkom	30	2
12.	Sertifikasi Kompetensi Administrator	30	3
13.	Uji Sertifikasi Jabatan Fungsional Pol PP	40	3
14.	Sertifikasi Kompetensi Lurah	30	3
15.	Webinar (11 kegiatan)	-	-
II.	<u>BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS</u>		
1.	Diklat Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal	40	7
2.	Diklat Verifikator Pertanggungjawaban Keuangan	40	7
3.	Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Kepala Desa (2 angkatan)	120	5
4.	Diklat Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	40	7
5.	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Teknis Kearsipan	-	-
6.	Diklat Mediasi dan Negoisasi (In House Training) Kantor Satpol PP Prov. Jatim	40	7
7.	Diklat Pengelolaan Sampah Terpadu dan Limbah Domestik	40	7
8.	FGD Penyusunan Tindak Lanjut Standar Diklat Manajemen Bencana	-	-
9.	Diklat Simulasi Kewaspadaan Bencana Bagi Rumah Sakit Pemprov Jatim	40	7
10.	High Quality Human Resource For High Quality Public Services	30	7
11.	Synergized Roles Of The Executive And Legislative In Policy Making To Develop A Conducive Investment Climate To Improve The Regional Economy	25	10
12.	The Role Of The Legislature In The Drafting Of Legislation And Human Rights	26	10
13.	Webinar (11 kegiatan)	-	-
III.	<u>BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSIONAL DAN SOSIAL KULTURAL</u>		
1.	FGD Penyusunan Kebijakan	-	-
2.	Penyusunan Standart Pembelajaran Diklat JF Analis Bangkom	-	-
3.	Diklat Pembentukan Arsiparis	30	33
4.	Diklat Perencana	30	6
5.	Diklat Analis Kebijakan	30	21
6.	Diklat Analis Pengembangan Kompetensi	30	14
7.	Diklat Pengamat Pengairan	30	9
8.	Diklat Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)	30	5
9.	Webinar (11 kegiatan)	-	-

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH	
		PST	HARI
IV.	<u>BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR DAN MANAJERIAL</u>		
1.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator – 3 Angkatan	120	105
2.	Penyusunan Standart Pembelajaran Blended	-	-
3.	Orientasi JPT Pratama	25	3
4.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas – 3 Angkatan	120	104
5.	Penyusunan kebijakan Teknis Pelatihan Blended	-	-
6.	Webinar (11 kegiatan)	-	-
V.	<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</u>		
1.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II (Pola Kontribusi) – 3 Angkatan	180	106
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pola Kontribusi) – 5 Angkatan	200	105
3.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kab/Kota (Pola Kemitraan) – 12 Angkatan	420	105
4.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Pola Kontribusi) – 4 Angkatan	160	104
5.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Kab/Kota (Pola Kemitraan) – 14 Angkatan	490	104
6.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III (Pola Kontribusi) – 10 Angkatan	412	74
7.	Pelatihan Dasar CPNS (Pola Kemitraan) – 16 Angkatan	560	74
8.	Diklat Satpol PP (Pola Kontribusi) – 3 Angkatan	120	6
9.	Diklat Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (Pola Kontribusi)	30	5
10.	Diklat Teknik Jalan dan Jembatan (Pola Kontribusi)	30	7
11.	Pelatihan Fungsional (Pola Kemitraan) – 18 Kegiatan	540	-
12.	Diklat Keprotokolan dan MC (Pola Kontribusi)	40	5
13.	Diklat Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) (Pola Kontribusi)	40	5
14.	Diklat Dasar Manajemen Bencana (Pola Kontribusi)	40	5
15.	Pelatihan Teknis (Pola Kemitraan) – 77 Angkatan	3.080	-
16.	Fasilitasi Analisis Kebutuhan Diklat – 4 Angkatan	-	-
17.	Fasilitasi Evaluasi Dampak Diklat – 4 Angkatan	-	-
18.	Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan (Pola Kontribusi)	240	3
19.	Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu (Pola Kontribusi)	119	3
VI.	Kegiatan pengembangan kompetensi lain dengan pola kemitraan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota atau PD Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur serta kegiatan pengembangan kompetensi yang akan ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2023		

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR



ARIES AGUNG PAEWAI
Pembina Utama Muda
NIP. 19760417 199511 1 001